

PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP KINERJA INSTANSI BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) OKU

Dapat Dia Wika Sari¹, Hasiatul Aini², Gitta Destalya Adrian Nova³
^{1,2,3} Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Baturaja
diawikadapat@gmail.com¹, hasiatulaini181107@gmail.com²,
gitta.destalya@gmail.com³

ABSTRACT

The purpose of this research was to determine the influence of accountability and transparency on the performance of the Regional Revenue Agency (BAPENDA) OKU. The method of analysis used in this research was multiple linear regression, hypothesis testing and coefficient of determination. Data used was primary data in the form of a questionnaire distributed to employees of the BAPENDA OKU, then data management methods and analysis using the SPSS 26 program.

The results of this research indicated that accountability and transparency had a significant influence on the performance of the Regional Revenue Agency (BAPENDA) OKU, both individually and simultaneously. The categorization of the Regional Revenue Agency based on the population was 116 employees, and the sample taken was 54 employees. To determine the sample, the Slovin formula was used.

The value of the coefficient of determination, which was adjusted, showed that the contribution of accountability and transparency was 79.8%, while 20.1% was influenced by other variables not included in this research. There were limitations of this research using data collection techniques by distributing questionnaires and not using secondary data. The influence of accountability and transparency on the performance of the Regional Revenue Agency (BAPENDA) OKU should have been strengthened and made more transparent to create a great confidence in the community towards the services provided by the Regional Revenue Agency (BAPENDA) OKU.

Keywords: *Accountability, Transparency, Performance of Institution.*

PENDAHULUAN

Akuntabilitas selama ini dipahami hanya terbatas pada penyusunan laporan keuangan bahkan lebih sempit lagi yaitu hanya

mencakup pertanggung jawaban anggaran akibatnya entitas menganggap bahwa kewajiban mempertanggung jawabkan kegiatan secara memadai itu hanya sebatas

pelaporan menggunakan dananya tanpa mengevaluasi manfaat dari kegiatan tersebut terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (Noor, Fahrizal dan Afrianti, 2015).

Konsep akuntabilitas dalam dunia kapitalisme telah sarat dimasuki nilai-nilai rasionalitas. Dunia kapitalisme mengalami krisis manajemen karena setiap hari terdapat skandal perusahaan, di mana para pemimpin mengkhianati rakyat mereka sendiri dan berusaha untuk mencari keuntungan duniawi. Mereka hanya peduli tentang kepuasan pemegang saham dan melupakan kewajiban moral dan etika lainnya untuk organisasi, ummah (masyarakat) dan masyarakat pada umumnya. Hal ini menyebabkan setiap pendekatan materialistis kepada manajemen dan akuntansi dalam sistem sekuler dan kapitalistik, yang telah berhasil menembus banyak masyarakat Islam. Hal ini disebabkan sebagian besar kurikulum sekolah dan Universitas di Negara Muslim yang mengajarkan berbagai seni Eropa modern dan ilmu, yang sebagian besar asing bagi perspektif Islam, memiliki unsur

sekularisme ke dalam pikiran masyarakat Islam (Prasetio, 2017).

Menurut Karina (2003) menjelaskan bahwa transparansi merupakan prinsip yang menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, yang terdiri dari informasi tingkat kebijakan, dan proses pembuatan serta hasil yang dicapai titik untuk itu, setiap organisasi harus memberikan akses informasi kepada seluruh pemangku kepentingan, baik itu kepada masyarakat rumah media, kelompok kepentingan serta pihak terkait lainnya sebagai salah satu wujud penerapan prinsip transparansi. (Julianto, Putu dan Nurdarmasih, 2019).

Transparansi seperti yang digunakan dalam istilah politik berarti keterbukaan dan pertanggungjawaban titik istilah ini adalah perpanjangan metafora dari arti yang digunakan di dalam ilmu fisika sebuah objek transparan adalah objek yang bisa dilihat tembus. Transparansi berarti keterbukaan dalam melakukan segala kegiatan organisasi. Dapat berupa keterbukaan informasi, komunikasi, bahkan

dalam hal *budgeting*. Transparansi bertujuan untuk menghindarkan seseorang dari rasa curiga yang lain kepadanya, dari fitnah dan persepsi negatif dan juga menjauhkan diri dari energi korupsi (Suherman dan Acep, 2018).

Akuntabilitas dan transparansi tersebut diharapkan masyarakat terwujud dalam pengelolaan keuangan daerah. Pentingnya akuntabilitas dan transparansi ini terlihat pada Kepres No. 7 Tahun 1999 dimana pemerintahan mewajibkan setiap intensif pusat maupun daerah sampai Esselon II untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sehubungan pentingnya keterbukaan informasi tentang, kegiatan dan aktivitas Pemerintahan Daerah, diterbitkan juga Undang-Undang No 14 Tahun 2008 keterbukaan informasi Publik (UU-KIP) tentang Transparansi kegiatan dan aktivitas Pemerintahan Daerah (Victorinus, 2019).

Tuntutan adanya transparansi dan akuntabilitas Publik atau Publik *Accountability* pada Era Reformasi

membawa dampak terhadap dalam proses pengembangan manajemen pemerintahan di Indonesia. Transparansi dan akuntabilitas publik merupakan dua sisi yang tidak terpisahkan sebagai bagian dari prinsip-prinsip data kelola yang baik atau *good governance*. Implikasinya, kini keduanya menjadi kajian yang marak dan *interhibile* penerapan pada pola perencanaan pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang partisipatif sebagai suatu konsekuensi logis (Kalalo Sabijono dan Harijanto, 2022).

Pengukuran kinerja intensif pemerintah memiliki kaitan erat dengan akuntabilitas dan transparansi. Untuk memantapkan mekanisme akuntabilitas, diperlukan manajemen kinerja yang baik. Pemahaman mengenai konsep kinerja organisasi publik dapat dilakukan dengan dua pendekatan yaitu melihat kinerja organisasi publik dari perspektif birokrasi itu sendiri dan melihat kinerja organisasi publik dari perspektif kelompok sasaran atau pengguna jasa organisasi publik. Kasus mengenai organisasi publik berkaitan erat dengan produktivitas, kualitas

pelayanan, tanggung jawab, akuntabilitas, serta persamaan pelayanan (Luci, 2013) Akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja di badan pendapatan daerah (BAPENDA) OKU adalah untuk mengetahui apakah kinerja pegawai sudah dilakukan sesuai dengan rencana aturan dan tujuan yang telah ditetapkan oleh instansi badan pendapatan daerah (BAPENDA) OKU.

Tabel 1. Laporan Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu 2019-2020

Tahun	Pendapatan		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2019	1. 602.719.976.241,00	1. 614.324.812.717,57	100,72
2020	1. 530.103.209.017,00	1. 385.250.143.114,29	90,53
2021	1. 632.597.265.525,00	1. 431.903.348156,99	87,71

Sumber: Penjabaran laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah kabupaten OKU 2019-2021

Berdasarkan tabel 1 dapat disimpulkan dari tahun 2019-2021 mengalami penurunan. Pada tahun 2019 realisasi anggaran penerimaan sebesar 100,72%, pada tahun 2020 realisasi anggaran penerimaan mengalami penurunan menjadi 90,53% dan pada tahun 2021 realisasi anggaran penerimaan

mengalami penurunan menjadi 87,71%. Penurunan tersebut karena pada tahun 2020-2021 terjadinya penyebaran *COVID-19*, sehingga menyebabkan kinerja instansi tidak optimal, adanya kebijakan pemerintah yang membatasi aktivitas masyarakat untuk membayar pajak. Hal ini dapat menjadi tantangan bagi instansi Badan Pendapatan Daerah untuk dapat meningkatkan kinerjanya.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan yang perlakuan akuntansi pada domain publik titik domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibanding dengan sektor swasta. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan bentuk organisasi yang berada di dalamnya akan tetapi juga karena kompleksnya lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut. Secara kelembagaan, dominan publik antara lain meliputi badan-badan pemerintah atau pemerintahan pusat dan daerah serta unit kerja pemerintah perusahaan milik negara (BUMN dan BUMD) yayasan.

Organisasi politik dan organisasi massa lembaga swadaya masyarakat (LSM) Universitas dan organisasi nirlaba lainnya. Jika dilihat dari variabel lingkungan sektor publik dipengaruhi oleh banyak faktor tidak hanya faktor ekonomis mata akan tetapi faktor publik sosial, budaya dan historis juga memiliki pengaruh yang signifikan. Sektor publik tidak beragam dan sangat heterogen (Mardiasmo, 2018:2).

Good governance adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara. *United nations economic for Asia and the pacific (UNESCAP)* mengartikan *governance* adalah suatu proses pembuatan keputusan dan proses tentang bagaimana keputusan-keputusan tersebut diimplementasikan. Secara mendasar, tata pemerintahan terdiri dari tiga aktor utama yaitu pemerintahan, sektor swasta dan *civil society* (masyarakat madani). Oleh karena itu, pemahaman konsep *governance* yang tepat adalah dengan melalui pemahaman proses integrasi peran antara pemerintahan

(*birokrasi*), sektor swasta dan *civil society* dalam suatu mekanisme yang berlaku (Noor, Fahrizal dan Afrianti, 2015)

Menurut Yanto (2021) akuntailitas adalah suatu perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (Riyanto, 2015).

Menurut Karina (2003) menjelaskan bahwa transparansi merupakan prinsip yang menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari informasi tingkat kebijakan dan proses pembuatan serta hasil yang dicapai titik untuk itu, setiap organisasi harus memberikan akses informasi kepada seluruh pemangku kepentingan, baik itu kepada masyarakat rumah media, kelompok kepentingan serta pihak terkait lainnya sebagai salah satu wujud penerapan prinsip transparansi

(Julianto, Putu dan Nurdarmasih, 2019).

Menurut Sihalocho dan Halim (2005) menyarankan agar sebelum instansi pemerintah menjalankan suatu sistem pengukuran kinerja maka perlu untuk memperhatikan beberapa faktor internal organisasi supaya menghindari informasi, hasil pengukuran kinerja menjadi informasi yang tidak termanfaatkan atau agar pelaksanaan sistem pengukuran kinerja tersebut tidak dilakukan hanya sebatas pemenuhan tuntutan tertib administratif saja. Berangkat dari saran tersebut maka penelitian ini menguji secara empiris faktor-faktor internal yang berhubungan dengan keberhasilan implementasi sistem pengukuran kinerja dalam konteks pemerintah di Indonesia, khususnya di pemerintah daerah.

Pengukuran kinerja sebagaimana yang diatur di Inpres No. 7 Tahun 1999 dilihat dari segi teoritis, adalah bentuk isomorfisme mimetik atau upaya meniru-niru pemerintah Indonesia terhadap pemerintahan di negara lain yang dinilai lebih maju. Menurut Tolbert dan Zucker (1983) reformasi

pelayanan sipil diadopsi karena menjadi simbolis dari pemerintahan yang baik bukan karena tujuan efisiensi. Oleh karenanya, peniruan yang dilakukan dapat mengarahkan organisasi kepada pelaksanaan suatu mekanisme kerja yang hanya sebatas seremonial formal, bukan berorientasi pada substansi (Sofyani, 2013).

- **Hubungan Variabel Bebas Akuntabilitas (X1) dan Transpransi (X2) dengan Variabel Terikat Kinerja Instansi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) OKU (Y)**

- **Hubungan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Badan Pedapatan Daerah (BAPENDA) OKU**

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. SAKIP terdiri dari beberapa komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu

perencanaan strategis
perencanaan kinerja
pengukuran kinerja dan
pelaporan kinerja (LAN-RI,
2003).

- **Hubungan Transparansi terhadap Kinerja Instansi Badan Pedapatan Daerah (BAPENDA) OKU**

Transparansi seperti yang digunakan dalam istilah politik berarti keterbukaan dan pertanggungjawaban.

Transparansi berarti keterbukaan dalam melakukan segala kegiatan organisasi. Dapat berupa keterbukaan informasi komunikasi, bahkan dalam hal *budgeting*. Transparansi bertujuan untuk menghindarkan seseorang dari rasa curiga yang lain kepadanya dari fitnah, dan persepsi negatif dan juga menjauhkan dirinya dari energi korupsi (Suherman dan Acep, 2018).

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian dilakukan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)

Ogan Komerling Ulu. Peneliti membahas penelitian dengan menganalisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Instansi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) OKU.

Jenis Dan Sumber Data

Jenis Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif dari judul badan pendapatan daerah (BAPENDA) OKU. Menurut (Sugiyono, 2022:8) metode kuantitatif dinamakan metode tradisional karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian sedangkan metode penelitian kuantitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivisme karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme.

Sumber Data

Data di gunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data yang digunakan Penilaian indeks sumber data dalam penelitian ini di peroleh dengan menyebarkan kuesioner (*angket*) kepada responden

yang dapat menggambarkan tentang variabel yang di teliti yaitu pada kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) OKU.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner. Menurut Sugiyono (2015:142) kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner dapat berupa pernyataan-pertanyaan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos atau internet.

Populasi Penelitian

Populasi

Menurut Sugiyono (2022:80) populasi adalah objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang

dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek/objek itu.

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini adalah Pegawai dari Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) OKU yang berjumlah 116 orang, jadi keseluruhan sampel 54 orang.

Sampel

Menurut Sujarweni (2015:80) Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini antara lain berdasarkan umur, jenis kelamin pendidikan, dengan jumlah 54 pegawai yang diambil sebagai responden. Berdasarkan pernyataan yang dibagikan koresponden, maka

diperoleh karakteristik sebagai berikut:

1. Jenis Kelamin

Tabel 2 Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
Laki-Laki	25	46,3 %
Perempuan	29	53,7 %
Total	54	100%

Sumber: Data diolah 2022

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa yang berjenis kelamin laki-laki sebesar 25 responden atau 46,3 % dan perempuan sebesar 29 responden atau 53,7 % dari keseluruhan responden penelitian yang berjumlah 54 responden.

2. Umur

Tabel 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Umur	Frekuensi	Presentase
35-39 Tahun	23	42,5%
40-44 Tahun	17	31,6,%
≥40 Tahun	14	25,9%
Total	54	100%

Sumber: Data diolah 2022

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa umur responden pada kisaran 35–39 tahun sebanyak 23 orang atau 42,5%, kemudian sebanyak 40-44 orang atau 17% berumur $40 \geq$ tahun, selanjutnya sebanyak 14 orang atau 25,9%. Jadi, dapat disimpulkan mayoritas responden berusia $35-39 >$ tahun.

3. Tingkat Pendidikan

Tabel 4 Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan

Pendidikan	Frekuensi	Presentase
SLTA	17	31,5
DIII	4	7,5
S1	31	57,2
S2	2	3,8
Total	54	100%

Sumber: Data diolah 2022

Di tabel 4 dapat dilihat bahwa untuk kelompok SLTA sebanyak 17 orang atau 31,5%. DIII sebanyak 4 orang atau 7,5%. Kemudian S1 sebanyak 31 orang atau 57%,2, dan S2 sebanyak 2 orang atau 3,8%. Berdasarkan data, maka mayoritas responden adalah berpendidikan S1.

a. Pengujian dan Hasil Analisis Data

i. Uji Instrumen

Analisis pengujian dalam penelitian ini meliputi

uji validitas dan uji reliabilitas, hasilnya dapat dijelaskan satu persatu sebagai berikut :

1. Uji Validitas

Menurut ghozali (2018:51) uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Untuk menentukan valid jika pernyataan pada kuesioner dilakukan perbandingan antara t hitung (*corrected item total correction*) dengan r tabel dimana $r = 5\%$, $df = 34 - 2 = 32$, r tabel = 0.3388 dengan kesimpulan apabila r hitung $>$ r tabel, uji validitas ini dilakukan dengan bantuan SPSS.

Berdasarkan hasil uji validitas terhadap 54 responden, diketahui nilai r -hitung setiap item pernyataan dari variabel independen lebih besar dari r -tabel sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap item pernyataan yang digunakan adalah valid.

2. Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2018:43) reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap

pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Untuk melihat reliabel masing-masing instrumen yang digunakan, penelitian menggunakan koefisien *cronbachalpha* (α).

Disini peneliti menggunakan SPSS untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik *cronbachalpha* (α). Hasil perhitungan uji reliabilitas dengan SPSS 16 dapat dilihat pada tabel 5

Tabel 5 Uji Reabilitas

Variabel	Koefisien Alpa	Keterangan
Pengaruh Akutabilitas	0,971477	Reliabel
Pengaruh Transparansi Kinerja Instansi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) OKU	0,94203	Reliabel
	0,928518	Reliabel

Sumber : Data primer yang diolah,2022

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui bahwa nilai *cronbach's alpha* untuk variabel X_1 (Pengaruh akuntabilitas) sebesar 0,971477,

variabel X_2 (Pengaruh transparansi) sebesar 0,94203 dan variabel Y (Kinerja Instansi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) OKU sebesar 0,928518. Hal ini berarti bahwa seluruh butir pernyataan dari semua variabel dapat dikatakan reliabel atau layak untuk digunakan sebagai alat penelitian.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi berdistribusi secara normal atau tidak. Resudial adalah nilai selisish antara variabel X dan variabel Y yang diprediksikan. Metode uji normalias yang digunakan yaitu dengan metode *one kolmogorov-Smirnov Z*. Dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika signifikasi (asyp.sig) > 0,05 maka data residual berdistribusi normal
- b. Jika signifikan (asyp.sig) < 0,05 maka daata resiudal tidak berdistribusi normal (Priyatno, 2016:194).

Tabel 6 Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardize d Residual
N		54
Normal	Mean	,0000000
Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	3,44714800
Most Extreme	Absolute	,086
Differences	Positive	,078
	Negative	-,086
Kolmogorov-Smirnov Z		,633
Asymp. Sig. (2-tailed)		,818

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui bahwa uji Kolmogorov smirnov test memiliki nilai signifikasi sebesar 0,818 lebih besar dari 0,05 maka model regresi yang digunakan mempunyai standar error yang normal, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dapat diuji lebih lanjut untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).Jika variabel dependen saling berkorelasi maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel

ortogonal adalah variabel dependen yang nilai korelasi antar sesama variabel indepenen sama dengan nol (Ghozali, 2016)

Metode pengujian yang digunakan yaitu dengan melihat nilai inflation faktor (VIF) dan Tolerance pada model regresi. Pedoman untuk menentukan suatu model regresi yang tidak terjadi multikolinieritas adalah:

- a. Apabila nilai nilai tolerance lebih dari 0,1 artinya terbebas dari gangguan multikolinieritas.
- b. Jika angka VIF ditabel koefisien kurang dari 10 maka terbebas dari gangguan multikolinieritas.

Hasil pengujian VIF dari model regresi disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 7 Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 Akuntabilitas	,763	1,311
Transparansi	,763	1,311

Sumber : data primer, 2022 (diolah)

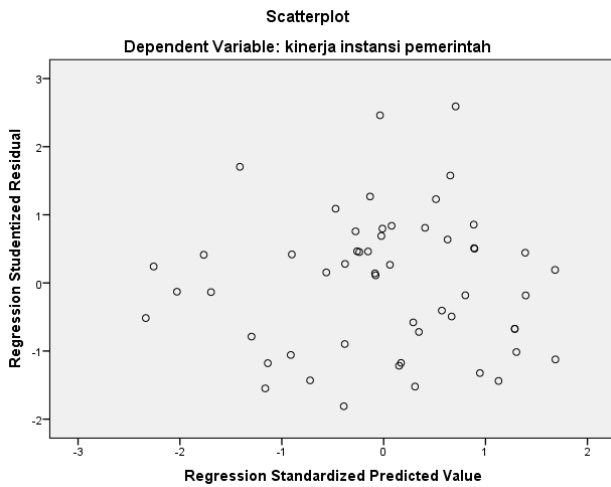
Berdasarkan hasil penghitungan seluruh variabel bebas memiliki nilai VIF <10 dan nilai *tolerance*>0.10. Variabel penerapan akuntansi sektor publik memiliki

nilai tolerance sebesar 0,763. Dan variabel pengendalian internal 0,763. Nilai VIF variabel penerapan akuntansi sektor publik sebesar 1,311 dan variabel pengendalian internal 1,311. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas dalam regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamat yang lain, jika *variance* dari residual pengamat kepengamat lain berbeda maka disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).

Dalam penelitian ini digunakan untuk mendeteksi gejala heteroskedastisitas dengan melihat grafik scatterplot antara *Z prediction* (ZPRED) yang merupakan variabel bebas (sumbu X = Y hasil prediksi) dan nilai residual (SRESID) merupakan variabel terikat (sumbu Y = Y prediksi Y rill).



Gambar 1 Uji Heteroskedastisitas

Hasil penelitian menunjukkan *scatterplot* titik-titik hasil pengolahan data antara ZPRED dan SRESID menyebar di bawah ataupun di atas titik original (angka 0) pada Y dan tidak mempunyai pola yang teratur maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi digunakan untuk menganalisis pengaruh antara variabel independen yaitu Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengendalian Internal serta variabel dependen yaitu Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil olah data data dilihat pada

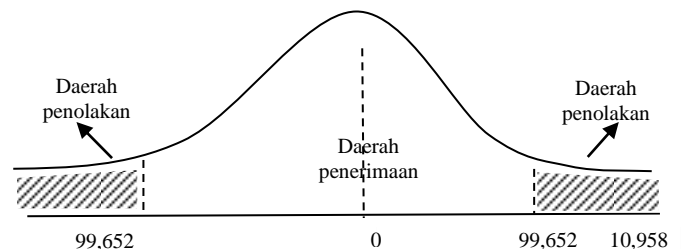
Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis ini akan dilakukan dengan uji-t langkah – langkah pengujian sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengolahan data yang terdapat dalam tabel 8 diperoleh koefisien t-hitung variabel pengaruh akuntabilitas sebesar 10,958 pengaruh transparansi sebesar 2,439, kemudian nilai t-tabel dicari dengan $df = n - k - 1 = 54 - 2 - 1 = 51$, pada tingkat keyakinan 95%, taraf signifikansi (α) = 0.05, pengujian dua sisi ($\alpha/2 = 0,025$), didapat t-tabel sebesar 1,67528.

Pengaruh akuntabilitas (X₁) terhadap Kinerja Instansi Badan Pendapatan Daerah (Y):

Karena t-hitung (10,958) > t-tabel (99,652) maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya bahwa Ada pengaruh akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu.

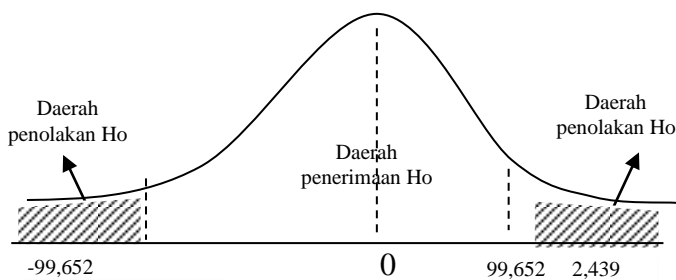


Sumber : Data Primer, 2022 (Diolah)

Gambar 2 Uji Hipotesis Parsial pengaruh akuntabilitas (X₁)

Pengaruh transparansi (X₂) terhadap instansi badan pendapatan daerah (BAPENDA) OKU(Y):

Karena t-hitung (2,439) > t-tabel (99,652) maka H₀ ditolak dan H_a diterima. Artinya bahwa Ada pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu).



Sumber : Data Primer, 2022 (Diolah)

Gambar 3
Uji Hipotesis Parsial Sistem Pengendalian Internal

Pengujian Secara Bersama-Sama / Simultan (Uji F)

Hasil perhitungan Uji F dapat dilihat pada tabel 9 sebagai berikut :

Tabel 9
Hasil Pengujian Secara Bersama – Sama

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	2446,216	2	1223,108	99,652	,000 ^b
1 Residual	625,965	51	12,274		
Total	3072,181	53			

a. Dependent Variable: kinerjainstansipemerintah

b. Predictors: (Constant), Transparansi, Akuntabilitas

Sumber : Data Primer, 2022 (Diolah)

Berdasarkan pada tabel 9 didapatkan F_{hitung} sebesar 99,652. Hasil tersebut kemudian dibandingkan dengan F tabel, F tabel di peroleh dengan melihat (df₁= jumlah variabel-1) = 3-1=2 dan (df₂=n-k-1) = 54-2-1=51 pada tingkat kepercayaan 95% atau α = 5% didapat F_{tabel} 3.28. Jadi F_{hitung} 2,439 > F_{tabel} 99,652, maka H₀ ditolak dan H_a diterima, artinya ada pengaruh akuntabilitas dan transparansi Terhadap Kinerja Instansi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien Determinasi untuk melihat seberapa besar tingkat pengaruh variable independen

terhadap variabel dependen dengan melihat nilai *R square* sebagai berikut:

Tabel 10 Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,892 ^a	,796	,788	3,503

a. Predictors: (Constant), Transparansi,

Akuntabilitas

b. Dependent Variable: kinerjainstansipemerintah

Sumber : Data Primer, 2022 (Diolah)

Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa koefisien determinasi (R^2) yang diperoleh sebesar 0,796. Hal ini menunjukkan berarti sumbangan pengaruh akuntansi dan transparansi terhadap Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 79,8% sedangkan sisanya 20,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis data didapatkan secara parsial ada pengaruh yang signifikan pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja instansi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sedangkan untuk variabel transparansi ada pengaruh

transparansi terhadap kinerja instansi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Akuntabilitas publik dan transparansi publik merupakan prinsip yang paling penting untuk mewujudkan kinerja pemerintah daerah yang baik. Akuntabilitas publik adalah sebuah informasi, pengungkapan aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi jika akuntabilitas dilakukan pemerintah terhadap pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan kinerja pemerintah karena hasil kinerja pemerintah dapat diukur dari pencapaian akuntabilitas. Dalam menghadapi akuntabilitas publik tersebut, pemerintah harus memperhatikan beberapa hal yang penting diantaranya adalah anggaran, pengendalian akuntansi, efektifitas pelaksanaan anggaran dan sistem pelaporan (Handayani, 2021)

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori bahwa Akuntabilitas selama ini dipahami hanya terbatas pada penyusunan laporan keuangan bahkan lebih sempit lagi yaitu hanya

mencakup pertanggungjawaban anggaran. Akhirnya, entitas menganggap bahwa kewajiban mertanggungjawaban kegiatan secara memadai itu hanya sebatas melaporkan penggunaan dananya, tanpa mengevaluasi manfaat dari kegiatan tersebut terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tidak sejalan dengan harapan masyarakat atas kondisi ideal pemerintah sebagai penyelenggaraan negara yang mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan (Noor, Fahrizal dan Afrianti, 2015).

Transparansi seperti yang digunakan dalam istilah politik berarti keterbukaan dan pertanggungjawaban. Transparansi berarti keterbukaan dalam melakukan segala kegiatan organisasi. Dapat berupa keterbukaan informasi komunikasi, bahkan dalam hal *bodgeting*. Transparansi bertujuan untuk menghindarkan seseorang dari rasa curiga yang lain kepadanya dari fitnah, dan persepsi negatif dan juga menjauhkan dirinya dari energi korupsi (Suherman dan Acep, 2018).

Secara simultan Fhitung $99,652 > F_{tabel} 3.28$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya ada pengaruh signifikan Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Instansi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) OKU. Koefisien determinasi (R^2) yang diperoleh sebesar 0.796. Hal ini menunjukkan berarti sumbangan pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap Kinerja Instansi Badan Pendapatan Daerah sebesar 79,8% sedangkan sisanya 20,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini dimaksud untuk mengkaji pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja instansi badan pendapatan daerah baik secara parsial maupun simultan. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara parsial ada Pengaruh Akuntabilitas dan Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Badan Pendapatan Daerah

(BAPENDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu.

2. Secara simultan $F_{hitung} 99,65 > 3,18 F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya ada Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Instansi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Koefisien determinasi (R^2) yang diperoleh sebesar 0.796. Hal ini menunjukkan berarti sumbangan pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 79,8% sedangkan sisanya 20,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka penelitian ini dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Penerapan Akuntansi Sektor Publik Pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu hendaknya lebih diperkuat lagi dan lebih transparansi agar dapat

menimbulkan keyakinan yang besar dalam masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu.

2. Hendaknya Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu terus meningkatkan organisasi melalui akuntabilitas dan transparansi agar nantinya tidak ada kelalaian yang dilakukan oleh instansi pemerintahan.
3. Diharapkan penelitian yang akan datang dapat mengeksplorasi variabel lain yang dapat berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina.Neo, R. eldis. (2019). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten aceh utara. *Jurnal Akuntansi Dan Pembangunan*, 5(1), 1–10.
- Arifin, T. (2020). Tansparansi Publik (Alvabeta).
- Erawati dan Adi. (2012). *Analisis*

- kinerja kawasan metropolitan sarbagita.* 1–19.
- Ghozali, I. (2022). *Aplikasi analisis multivariete dengan program IBM SPSS 23* (P. U. Diponegoro (ed.).
- Handayani, N. (2021). pengaruh akuntabilitas, transparansi publik serta fungsi pemeriksaan inten terhadap kinerja pemerintah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(8), 1–17.
- Ihsan Hidayatul, Rosita, A. (2015). Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dalam mewujudkan good governance pada politeknik Negeri Padang. *Jurnal Akuntansi &Manajemen*, 10(2), 51–60.
- Agustina.Neo, R. eldis. (2019). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten aceh utara. *Jurnal Akuntansi Dan Pembangunan*, 5(1), 1–10.
- Arifin, T. (2020). Tansparansi Publik (Alvabeta).
- Erawati dan Adi. (2012). *Analisis kinerja kawasan metropolitan sarbagita.* 1–19.
- Ghozali, I. (2022). *Aplikasi analisis multivariete dengan program IBM SPSS 23* (P. U. Diponegoro (ed.).
- Handayani, N. (2021). pengaruh akuntabilitas, transparansi publik serta fungsi pemeriksaan inten terhadap kinerja pemerintah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(8), 1–17.
- Ihsan Hidayatul, Rosita, A. (2015). Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dalam mewujudkan good governance pada politeknik Negeri Padang. *Jurnal Akuntansi &Manajemen*, 10(2), 51–60.
- Indrawati, Y. (2021). Telaah repomasi akuntansi sektor publik di indonesia: perspektif luder contingence model. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 12(2), 95–111.
- Julianto putu. Nurdarmasih, tungga atmaja. (2019). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sistem pemberian kredit mutranin pada dadia tangkas kori agung Desa Pakraman bila rajang ,

- kecamatan kabutambahan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 10(1), 208–217.
- Kalalo Y.B, Sabijono Harijanto, desni T. (2022). Evaluasi penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan berdasarkan PP RI Nomor 29 Tahun 2014 pada pengendalian militer III-17 Manado. *Jurnal EMBA*, 10(4), 50–61.
- Kurjuni, D. M. (2009). Transparansi dan Akuntabilitas dalam pelayanan publik. *Demokrasi*, 8(1).
- Luci, A. (2013). Analisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keangan daerah terhadap kinerja pemerintahan daerah. *Jurnal Fairness*, 3(1), 21–42.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi sektor publik (Andi).
- Noor fahrizal. afrianti, S. (2015). Penilaian indeks akuntabilitas instansi pemerintah. *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara*, 1(1), 21–42
- Prasetio, januar eko. (2017). Tazkiatun nafs: kajian teoritis konsep akuntabilitas. *Jurnal Analisis Akuntansi Dan Perpajakan*, 1(1), 19–33.
- Pratama, A. N. (2019). Implimentasi E-Budgeting sebagai upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah Kota Binjai. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 9(2), 1–13.
- Priyatno, D. (2017a). *Panduan Praktik Olah Data Menggunakan SPSS* (R. I. Utami (ed.); Edisi Satu). CV. ANDI OFFSET.
- Priyatno, D. (2017b). *Panduan praktis olah data menggunakan SPSS* (Andi (ed.)).
- Sofyani. (2013). hubungan faktor internal institusi dan implimentasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) di pemeintahan daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 10(2), 36–46.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D*. (Alfabeta (ed.)).
- Suherman.acep. (2018). Lapoan keuangan sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, 6(12),

- 128–138.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Metodologi penelitian bisnis dan ekonomi* (P. P. Baru (ed.)).
- Taufeniik, T. (2013). peran monitoring dan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan daerah. *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 199–211.
- Tika, S. (2017). Analisis peran akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah terhadap tingkat indeks tata kelola pemerintahan. *Ekspansi*, 9(2), 256–274.
- Tyas Wahyuni, yutiningrum agung. (2022). Pengaruh implamentasi E-procuremen dan akuntabilitas terhadap efisiensi pengadaan barang dan jasa pada dinas perhubungan kabupaten probolinggo. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 5(2), 2153–2165.
- Victorinus, L. (2019). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja anggaran berkonsep value for money pada pemerintah kabupaten nias. *Riset & Jurnal Akuntansi*, 3(1), 91–101.
- Yanto heri, H. nurul. (2021). Efektivitas pelatihan keuangan dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan dana desa. *Business and Accounting Education Journal*, 2(2), 219–229.